

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan transparansi informasi perusahaan yang berupa adanya kebijakan anti korupsi perusahaan.
2. Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Komite audit yang memiliki pengalaman dan pendidikan sudah pasti memiliki ilmu-ilmu dalam keuangan termasuk dalam hal mengenai kecurangan. Dari pengalaman, pendidikan, dan ilmu yang dimiliki seorang komite audit merupakan bentuk kompetensi yang dapat direalisasikan didalam pekerjaan untuk membantu dewan komisaris membuat sebuah kebijakan, yang salah satunya adalah kebijakan anti korupsi di perusahaan.

3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi. Cenderung menanamkan saham di perusahaan yang sadar dan peduli dengan aktivitas perusahaan, berupa tanggungjawab social dengan melengkapi kebijakan anti korupsi di laporan keuangan tahunan.
4. Kepemilikan manajerial di dalam penelitian ini ditolak. Dengan adanya kepemilikan manajer yang cenderung rendah di sebuah perusahaan, belum tentu hak suaranya digunakan karena ada kepemilikan saham yang lebih dominan daripada kepemilikan manajerial.
5. Kepemilikan *blockholder* dalam penelitian ini ditolak. Kepemilikan *blockholder* hanya menginginkan manajer untuk memberikan dividen yang besar terhadap *blockholder*, karena *blockholder* hanya berfokus kepada harga saham dan prospek keuntungan perusahaan kedepannya daripada menggunakan kekuatan kepemilikannya sebagai pengawas untuk mendorong manajer memiliki atau melengkapi kebijakan anti korupsi perusahaan
6. Kepemilikan pemerintah di dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Pemerintah harus menjaga kredibilitasnya terhadap masyarakat, sekaligus menjadi bentuk nyata pencegahan adanya korupsi di Indonesia.
7. Tata kelola perusahaan di dalam penelitian ini ditolak. Tidak terpenuhinya asas-asas tata kelola yang baik cenderung kurang transparan atau

tidak memiliki dewan komisaris yang independen sehingga akan berpengaruh dalam memberikan informasi mengenai perusahaan untuk pemegang saham dan masyarakat. Tata kelola yang belum baik juga cenderung belum memiliki kebijakan yang tertata, lengkap dan baik pula seperti memiliki kebijakan anti korupsi sehingga tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh untuk kebijakan anti korupsi.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dengan topik serupa, jika ingin menggunakan variabel yang sama dapat menggunakan teori selain *Theory of The Firm*, dapat menggunakan teori legitimasi atau teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian ini.
2. Perusahaan atau emiten harus memiliki komite audit yang berkompeten, karena terbukti bahwa komite audit yang berkompeten dapat mempengaruhi adanya kelengkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Perusahaan dapat mencari komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi maupun keuangan. Serta perusahaan dapat memiliki dewan komisaris yang independen setengah dari seluruh jajaran

dewan komisaris karena terbukti mempengaruhi kelengkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

3. Pemerintah dapat membuat pembaharuan peraturan mengenai minimal presentase dewan komisaris yang independen menjadi lebih dari 30%, karena terbukti bahwa dewan komisaris yang independen pada perusahaan sektor *property, real estate & building construction* rata-rata ada lebih dari 30%.

### 5.3 Keterbatasan Riset

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu nilai dari R squared sebesar 0,0717 artinya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen hanya sebesar 7,17%.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu sektor perusahaan yang jumlahnya hanya sedikit, sehingga saat harus melakukan pengurangan data sisa sampel tidak terlalu banyak.
3. Kurangnya laporan keuangan yang dapat diakses oleh peneliti karena ada perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan.